

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

### SURAT EDARAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-no-2-tahun-2023/detail>, diakses 14 Oktober 2023

### BUKU

Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2021.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan kesepuluh.

Aryono, dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan kedua.
- Fathonah, Ati Novianti, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hutapea, Purba, *Pengertian dan Sejarah Pencatatan Sipil di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Imran, Ali, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Is, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Jauhari, Iman, dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, Sleman: Deepublish, 2021.
- Lina Sinaulan, Ramlani, *Teori Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021, cetakan kedua.
- Mahestu, I Gayes, dan Octama Dwitaningsih, *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*, Jakarta: Pusat Perbukuan BSKAP KEMENDIKBUDRISTEK, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan ketigabelas.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan kesepuluh.
- , *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Melani dkk, “Disparitas Penafsiran Hakim atas Pasal 2 dan 3 Undang-undang PTPK dan Implikasinya” dalam Danang Wijayanto, (ed.), *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.

- Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramdani, Dani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rasjidi, Lili, dan B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rato, Dominikus, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rudyat, Charlie *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2022.
- Sa'adah, Sri Lumatus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Saifudin, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pemahaman Dasar*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2002.
- Santoso, Aris Prio Agus dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*, (Jakarta: FH Utama Jakarta, 2011.
- Shoim, Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: C.V. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Siddiq, Muhammad, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022, Cetakan kedua puluh satu.

Soerjowinoto, Petrus, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), cetakan pertama edisi kedelapan.

Suharso, dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2022. Cetakan keempatbelas.

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Thalib, Muhamad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

## **JURNAL**

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 Th. XVII, Agustus 2015, Diakses 2 Agustus 2024, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069>

Juanda, Enju, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4 Nomor 2 September 2016, Diakses 21 Maret 2024, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/322>

Mubarok, Naf'i, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, *Al-Hukama*, Volume 02 No. 02 Desember 2012, Diakses 8 Oktober 2023, <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1385/>

Nikodemus, Yohanes Endi, “Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik”, *Kamayana: Jurnal Ilmu Agama*, Volume 6 Nomor 3 2023, Diakses 20 April 2025,

<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/2689>

Pratiwia, Virna Dita, Wistina Sineru, dan Edi Sumarwan, ‘Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha’, *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 2 No. 2 2023, Diakses 20 April 2025  
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/9256>

Suarnada, I Gede Made, ‘Pola Perkawinan Umat Hindu Dengan Umat Beragama Lain di Kota Palu’, *Widya Genitri*, Volume 5 No. 1 Desember 2014, Diakses 20 April 2025,  
<https://jurnal.dharmasentana.ac.id/widyagenitri/article/view/74>

Warman, Arifki Budia, ‘Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia’, *Ijtihad*, Volume 35 No. 2 2019, Diakses 15 Juni 2024,  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>

O Zada, Khamami, ‘Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama’, *Ahkam*, Volume XIII Nomor 1 Januari 2013, diakses 20 April 2025,  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/949>

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 No. 23.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang no. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran RI Nomor 3143. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Lembaran Negara RI Tahun 1946 Nomor 22. Tanpa Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran RI Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran RI Nomor 4419. Sekretariat Negara. Jakarta. Pasal 9 Juncto Pasal 49.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009). Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran RI Nomor 3316. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran RI Nomor 4674. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran RI Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **PP, PERPRES, DAN KOMPILASI HUKUM**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran RI Nomor 3050. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 184. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tanpa Lembaran Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023.

## **PUTUSAN DAN FATWA**

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan Ketua Majelis Moh. Mahfud MD, Diakses 24 Januari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead091b1782de09ff2313231373535.html>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST, diakses 18 April 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f416c1eddc09321313530363535.html>

Fatwa MUI No. 4/MUNASVII/MUI/8/2005, diakses 21 April 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama>

## **SITUS WEB**

Falahiatika, Kania, Yandri Susanto Datangi MA Minta Batalkan Izin Pernikahan Beda Agama, *Detik News*, diakses 18 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6817880/yandri-susanto-datangi-ma-minta-batalkan-izin-pernikahan-beda-agama>

Ilham, Hukum Nikah Beda Agama, Majelis Tarjih: Haram!, *Muhamadiyah*, Diakses 21 April 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2022/12/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>

Ishom, M, Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses 16 Oktober 2023.

<https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses 14 Oktober 2023.

Hakim MA Perlu Ikuti Putusan MK dan Institusi Agama terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama, *Komisi VIII DPR RI*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42600/t/Hakim+MA+Perlu+Ikuti+Putusan+MK+dan+Institusi+Agama+terkait+Pengesahan+Perkawinan+Beda+Agama>, diakses 14 Oktober 2023.

NF, Muhammad Syakir, Keputusan Muktamar Nu: Nikah Beda Agama Tidak Sah, *NU Online*, diakses 21 April 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168BT>

Setara Institute, SEMA 2/2023 Tidak Kompatibel dengan Kebhinekaan dan Negara Pancasila, <https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebhinekaan-dan-negara-pancasila/>, diakses 16 Oktober

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>, diakses 13 Juni 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401> diakses 20 April 2025.

Anggota Komisi 8 Desak Mahkamah Agung Batalkan Putusan Pengesahan Nikah Beda Agama, *Banten Inside*, diakses 18 April 2025, <https://banteninside.co.id/nasional/anggota-komisi-8-desak-mahkamah-agung-batalkan-putusan-pengesahan-nikah-beda-agama/>

Yandri Susanto: MA Harus Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat Yang Membolehkan Nikah Beda Agama, *MPR RI*, diakses 18 April 2025, <https://mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-MA-Harus-Batalkan-Putusan-PN-Jakarta-Pusat-yang-Membolehkan-Nikah-Beda-Agama>

**SKRIPSI**

- Hidayah, Siti Rofiqotul, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Achmad Sidiq Jember, 2022.
- Nurfauziah, Rizqi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi di perumahan Cikande Kecamatan Cikande Serang Banten)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2015.
- Pujiono, “Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378./Pdt.P/2022/PN Yyk)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Suaibi, Deza Arman, “Perlindungan Hak-hak Anak dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.